



**PENGARUH JUMLAH UNIT USAHA, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN (UMK) TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI BESAR
DAN SEDANG DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Oleh

Azzura Khaula Haq

NIM. 140810101191

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PENGARUH JUMLAH UNIT USAHA, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN (UMK) TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI BESAR
DAN SEDANG DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ekonomi Pembangunan (S1)
dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Azzura Khaula Haq

NIM. 140810101191

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati serta ungkapan atas rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak Ansori Miftahudin dan Ibu Siti Zulaikha, yang telah memberikan doa serta dorongan dan dukungan kepada saya saat ini, yang mendidik saya dengan rasa cinta dan kasih sayang dan dengan ketulusan hati, dan selalu menjadi inspirasi untuk mendorong saya untuk meraih cita-cita.
2. Segenap keluarga besar yang telah mendorong saya dan memberikan semangat dalam setiap perjalanan hidup kepada saya untuk menempuh pendidikan agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan.
3. Guru-guru saya yang telah memberikan ilmu yang sangat tidak ternilai kepada saya mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar dan sampai saat ini saya bisa menempuh ke perguruan tinggi.
4. Teman-teman saya yang telah memberikan dorongan semangat, memberikan bantuan kepada saya serta selalu menemani saya dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi.
5. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

MOTTO

“If you don’t get what you want, you suffer; if you get what you don’t want, you suffer; even when you get exactly what you want, you still suffer because you can’t hold onto it forever. Your mind is your predicament. It wants to be free of change. Free of pain, free of obligations of life and death. But change is law and no amount of pretending will alter that reality.” - Socrates

“It’s not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.” – Charles Darwin

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Azzura Khaula haq

NIM : 140810101191

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Tengah“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada intuisi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Desember 2018

Yang menyatakan,

Azzura Khaula Haq
140810101191

SKRIPSI

**PENGARUH JUMLAH UNIT USAHA, PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO (PDRB), DAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN (UMK) TERHADAP PENYERAPAN
TENAGA KERJA SEKTOR INDUSTRI BESAR
DAN SEDANG DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

Oleh:

Azzura Khaula Haq

NIM. 140810101191

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Dra. Nanik Istiyani, M.Si.

Dosen Pembimbing II : Aisah Jumiati, S.E., M.P.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Produk Domestik Bruto Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Tengah

Nama Mahasiswa : Azzura Khaula Haq

NIM : 140810101191

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia

Tanggal Persetujuan : 1 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Nanik Istiyani, M.Si.
NIP. 195504251985031001

Aisah Jumiati, S.E., M.P.
NIP. 196809261994032002

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes
NIP. 196411081989022001

Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar Dan Sedang Di Provinsi Jawa Tengah

Azzura Khaula Haq

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel jumlah unit usaha, PDRB dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah. Data yang di gunakan merupakan data sekunder berupa data *time series* dan *cross section* selama tahun 2010-2015. Metode yang digunakan pada penelitian yaitu Analisis Regresi Data Panel. Penelitian ini menunjukkan bahwa: Variabel jumlah unit usaha, berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah. Variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah. Variabel UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.

Kata Kunci : Jumlah Unit Usaha, PDRB, Penyerapan Tenaga Kerja, dan UMK

*The Influence of Business Unit Quantity, Gross Domestic Regional Product, and
The Minimum Wage of District against Labour Absorption among
Large and Medium Industrial Sectors in Central Java.*

Azzura Khaula Haq

Economics Major and Development Study, Faculty of Economy and Business

Jember University

ABSTRACT

This research aims to determine the influence of the variable business unit quantity, PDRB, and UMK on labour absorption among large and medium industrial sectors in Central Java. The data used in this study is secondary data in the form of time series and cross section during 2010-2015. The method used in this research is Panel Data Regression Analysis. This study shows that: Variable of business unit quantity, has a significant and positive effect on the labour absorption of large and medium industrial sectors in Central Java. The PDRB variable has a significant and positive effect on the labour absorption of large and medium industrial sectors in Central Java. The UMK variable has a significant and positive effect on the labour absorption of large and medium industrial sectors in Central Java. The result of this study proves that all of the three variables affect the enhancement of labour absorption among large and medium industrial sectors in Central Java.

Keywords: *Business unit quantity, PDRB, Labour absorption, and UMK*

RINGKASAN

Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar Dan Sedang Di Provinsi Jawa Tengah, Azzura Khaula Haq, 140810101191, 2018, 62 halaman, Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan tingkat *gross national product* (GNP) yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya.

Industri merupakan salah satu sektor unggul yang dapat digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Industrialisasi mulai digalakkan dari waktu ke waktu dengan salah satu tujuannya adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk, salah satunya yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Dengan berkembangnya sektor industri, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Penyerapan tenaga kerja sektor industri di Provinsi Jawa Tengah ini dipengaruhi oleh beberapa variabel ekonomi antara lain jumlah unit usaha, PDRB, dan UMK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha, PDR, dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan Analisis Regresi Data Panel menunjukkan: variabel jumlah unit usaha, PDRB, dan UMK berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini membuktikan dengan adanya jumlah unit usaha, PDRB, dan UMK akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah unit usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan unit usaha yang ada didalam suatu daerah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena peningkatan jumlah unit usaha yang ada pasti memerlukan berbagai macam aktivitas yang akan membutuhkan tambahan terhadap tenaga kerja yang digunakan dalam proses aktivitas usaha.

PDRB berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa tengah. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya peningkatan nilai PDRB didalam suatu daerah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Meningkatnya jumlah PDRB menunjukkan semakin meningkatnya output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah yang juga meningkat. Semakin besar penjualan yang dilakukan oleh perusahaan akan mendorong perusahaan untuk menambah permintaan tenaga kerja guna mengejar peningkatan penjualan yang terjadi, sehingga menyebabkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja.

UMK berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya upah minimum kabupaten yang sesuai dengan kemampuan industri dan kebutuhan masyarakatnya akan memberikan kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah. Pengaruh positif UMK terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah didukung fakta bahwa Jawa Tengah memiliki faktor produksi tenaga kerja relatif banyak, sehingga memproduksi barang yang padat karya. Industri yang bersifat padat karya dan berorientasi ekspor inilah yang diduga menjadi penyebab kenaikan upah minimum berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah, berkah serta ridho-Nya dan tak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad SAW atas petunjuk yang telah diberikan kepada umatnya mulai zaman jahiliyah hingga menuju jalan kebenaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik motivasi, nasehat, dorongan, kasih sayang, dan kritik yang positif dan membangun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Nanik Istiyani, M.Si., selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan banyak waktu luang, tenaga serta pikiran untuk membimbing, memberikan arahan dalam membantu menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Aisah Jumiati, S.E., M.P., selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran, memberikan arahan dalam penyusunan skripsi. Serta dengan ikhlas membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E., M.M., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Sebastiana Viphindrartin, M.Kes. selaku Ketua dan Dr.Lilis Yuliati, S.E, M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Jember;

5. Ibu Dr. Regina Niken W., S.E, M.Si. selaku Ketua Program Studi S1 Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta staf karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
7. Bapak Ansori Miftahudin dan Ibu Siti Zulaikha, serta adik-adik saya Najwa Fulki Assyifa dan Queen Fatih Karimy terima kasih yang tulus penulis ucapkan atas doa yang terus dipanjatkan untuk saya, dukungan, semangat, kasih sayang yang tulus, kesabaran, keikhlasan, kerja keras, dan pengorbanan yang sampai saat ini diberikan tidak dapat dinilai oleh apapun;
8. Seluruh keluarga besar dan teman-teman di kampung halaman yang telah memberikan doa, dukungannya serta selalu menjadi motivasi dan pengingat bagi penulis;
9. Sahabat sekaligus keluarga Fitria Iswaningrum, Erfatul Hasanah, Cindy Boni Artha Gultom, Iswanto, Melinda, Citra Kharisma Dewi dan Ni Kadek Udianti terima kasih banyak atas waktu luang yang selalu kalian berikan, dukungan, dan semangat yang memotivasi penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, penulis menyadari atas kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan bagi penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan pengetahuan bagi penulisan karya tulis selanjutnya.

Jember, 16 Desember 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
RINGKASAN	x
PRAKATA	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori Tenaga kerja.....	9
2.1.2 Teori Industri	12
a. Definisi Industri	12
b. Industrialisasi	13
c. Klasifikasi Industri	14
2.1.3 Jumlah Unit Usaha.....	15

a. Hubungan Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja	16
2.1.4 Teori Produk Domestik Regional Bruto	17
a. Hubungan PDRB dengan Penyerapan Tenaga Kerja	20
2.1.5 Teori Upah Minimum	20
a. Fungsi Upah.....	22
b. Faktor yang Mempengaruhi dalam Upah Minimum.....	23
c. Hubungan Upah Minimum terhadap Tenaga Kerja	24
2.2 Penelitian Terdahulu	25
2.3 Kerangka Konseptual	35
2.4 Hipotesis Penelitian	37
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Unit Analisis	38
3.3 Jenis dan Sumber Data	38
3.4 Metode Analisis Data	39
3.4.1 Pemilihan Metode Estimasi Data Panel	40
3.4.2 Uji Asumsi Klasik	41
3.4.3 Uji Hipotesis	43
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Hasil Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	46
a. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Tengah	46
b. Kondisi Demografis Provinsi Jawa Tengah	48
c. Gambaran Umum Variabel Penelitian	49
4.2 Hasil Analisis Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang Di Provinsi Jawa Tengah	55
4.2.1 Uji Chow.....	55

4.2.2 Uji Hausman	55
4.2.3 Hasil Regresi Data Panel	56
4.2.4 Uji Asumsi Klasik	57
a. Uji Normalitas	57
b. Uji Multikolinearitas	58
c. Heteroskedastisitas	59
d. Uji Autokorelasi	59
4.2.5 Uji Hipotesis	61
a. Uji t (Uji Koefisien Regresi secara Individual)	61
b. Uji F (Koefisien Regresi secara Keseluruhan)	62
c. Uji R ² (Koefisien Determinasi)	63
4.3 Pembahasan Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang Di Provinsi Jawa Tengah	63
4.3.1 Pengaruh Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	63
4.3.2 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	64
4.3.3 Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja	65
BAB 5. PENUTUP	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2015 (persen)	3
Tabel 1.2 Jumlah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jawa Tengah Tahun 2010-2015.....	7
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	31
Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Di Provinsi Jawa Tengah	46
Tabel 4.2 Tabel Jumlah Penduduk Jawa Tengah Tahun 2010-2015	48
Tabel 4.3 Data Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang Di Jawa Tengah Tahun 2010-2015.....	49
Tabel 4.4 Data Jumlah Sektor Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015.....	50
Tabel 4.5 Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015.....	52
Tabel 4.6 Data Upah Minimum Kabupaten (UMK) Sektor Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015	53
Tabel 4.7 Hasil Analisis Uji Chow	55
Tabel 4.8 Hasil Analisi Uji Hausman	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Data Panel Menggunakan Metode Fixed Effect....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas	59
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	59
Tabel 4.12 Hasil Uji Autokorelasi	60
Tabel 4.13 Hasil Estimasi <i>Cross Section Fixed Effect</i>	61
Tabel 4.14 Hasil Uji t	62
Tabel 4.15 Hasil Uji F	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2015	4
Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	36
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah	48
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	58

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rekapitulasi Data Sekunder Penelitian	73
Lampiran 2. Hasil Uji Analisis	79

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2013).

Pembangunan ekonomi bertujuan menciptakan tingkat *gross national product* (GNP) yang setinggi-tingginya, akan tetapi diikuti dengan pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik, peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, pemerataan kebebasan individual, dan penyegaran kehidupan budaya (Saputri, 2011).

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Sumber daya alam yang optimal menjadikan sumber daya yang produktif secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Pembangunan bangsa yang bertitik berat pada bidang ekonomi berlangsung dalam jangka panjang dan akan mengalami kemajuan jika syarat pokok terpenuhi. Salah satu syarat pokok terpenuhinya kemajuan serta semangat tinggi untuk bekerja yang menggerakkan secara bersama dalam semua kegiatan agar dapat memperoleh manfaat sumber daya lainnya dalam proses pembangunan (Simanjuntak, 2001).

Mencapai tujuan dan aspirasi yang tercantum dalam UUD 1945, strategi dan kebijakan pembangunan sektor industri harus tetap dilakukan bersama dengan

sektor-sektor dan bidang-bidang lain dalam ruang lingkup strategi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. sejalan dengan hal tersebut maka peran sektor industri semakin penting, sehingga sektor industri mempunyai peranan sektor pemimpin atau *Leading Sector*, peranan sektor industri dalam perekonomian suatu wilayah terlihat dalam kontribusi atau sumbangan sektor industri dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut (Dumairy, 2000).

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan penduduk suatu wilayah adalah tingkat PDRB yang merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Dalam realitanya, PDRB mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Output yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja yang diminta.

Industrialisasi mulai digalakkan dari waktu ke waktu dengan salah satu tujuannya adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja yang semakin meningkat dengan semakin tingginya laju pertumbuhan penduduk. Pengertian industri sebenarnya sangatlah luas cakupannya yakni mulai dari pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Tujuan lain diharapkan dapat tercapai melalui pembangunan industri adalah semakin luasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, penghematan devisa khususnya melalui pembangunan industri substitusi impor, peningkatan ekspor serta semakin meningkatnya pembudidayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Pulau Jawa sebagai pusat kegiatan ekonomi di Indonesia memiliki tingkat kemajuan pembangunan tertinggi jika dibandingkan dengan pulau-pulau lain.

Kekayaan sumber daya alam, angkatan kerja usia muda yang berpendidikan, pasar domestik yang luas yang tumbuh secara cepat, digabungkan dengan kondisi sarana dan prasarana yang lengkap menjadi faktor keunggulan Pulau Jawa. Pulau Jawa masih diandalkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Hal tersebut dikarenakan dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, dan sumber daya alam, Pulau Jawa lebih siap menjadi lokasi pengembangan industri dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia (Kemenperin, 2013).

Tabel 1.1 Kontribusi Industri Pengolahan Terhadap PDRB Menurut Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2015 (persen)

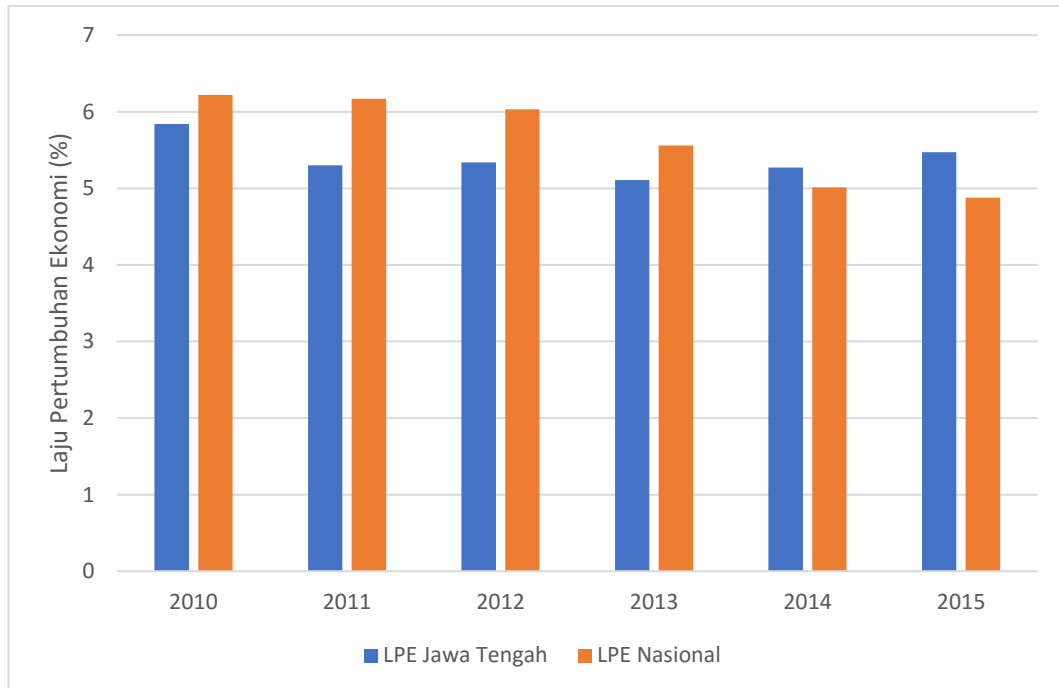
Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
DKI Jakarta	14.2	13.89	13.79	13.54	13.57	13.8
Jawa Barat	44.51	43.90	43.23	43.22	43.64	43.03
Jawa Tengah	34.52	34.88	34.95	35.21	35.67	35.08
DI Yogyakarta	13,28	13,48	13,36	13,62	13,59	13,11
Jawa Timur	29.55	29.15	29.28	28.79	28.95	29.28
Banten	39.71	38.49	37.5	37.3	34.7	33.52

Sumber: PDRB Provinsi-provinsi di Indonesia, berbagai edisi, BPS

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa kontribusi industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi dengan rata-rata 42,06 persen setiap tahunnya, hanya kalah dari provinsi Jawa Barat dan Banten. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah juga menempati urutan teratas jika dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan nilai PDRB terbesar keempat se-Indonesia. Selama periode tahun 2010-2015 kinerja perekonomian di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Data Badan Pusat Statistik (2016), menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2010-2013 lebih rendah dibanding laju pertumbuhan ekonomi nasional, sedangkan tahun 2014-2015 lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan ekonomi nasional (gambar 1). Kondisi laju pertumbuhan PDRB provinsi Jawa Tengah yang lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional didorong oleh percepatan pertumbuhan investasi dan konsumsi rumah tangga. Hal ini didukung oleh keunggulan letak geografis Provinsi Jawa Tengah

kerena terletak diantara Jawa Barat dan Jawa Timur sehingga ada mobilitas penduduk yang tinggi di Jawa Tengah dan apabila dimanfaatkan dengan baik pastinya dapat membantu pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah.



Gambar 1.1 Laju pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2015 (Sumber: BPS Jawa Tengah, 2015)

Nilai PDRB pada suatu tahun, bila dibagi dengan jumlah penduduk tahun tersebut akan menghasilkan PDRB per kapita yang biasa digunakan untuk melihat kesejahteraan penduduk pada tahun tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), Provinsi Jawa Tengah memiliki PDRB per kapita rendah dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan tingkat kesejahteraan penduduk yang belum merata.

Provinsi Jawa Tengah memiliki permasalahan mengenai tingginya laju pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan meningkatnya pengangguran. Sehingga jumlah penduduk miskin juga masih tergolong tinggi. Peningkatan jumlah penduduk tersebut seharusnya dibarengi dengan penambahan jumlah lapangan pekerjaan agar tidak mengakibatkan pengangguran yang semakin meningkat serta memperhatikan tingkat upah karena dapat mempengaruhi

penyerapan tenaga kerja. Namun pada kenyataannya penyerapan tenaga kerja masih belum maksimal karena terjadi kenaikan dan penurunan penyerapan tenaga kerja.

Struktur perekonomian Provinsi Jawa Tengah didominasi sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian. Sektor industri memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB, diikuti sektor perdagangan dan sektor pertanian (Bappenas, 2014). Dengan berkembangnya sektor industri, diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah. Namun, industri cenderung terkonsentrasi di daerah yang memiliki potensi besar dengan akses yang cepat untuk memperoleh bahan baku. Kota umumnya menawarkan kelebihan dalam pendapatan yang lebih tinggi, menarik investasi baru dan teknologi. Oleh karena itu banyak industri dalam perkotaan. Persebaran industri yang tidak merata ini dapat menimbulkan disparitas dalam laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah, karena terkonsentrasi pada daerah tertentu saja. Menurut Haryani (2002) jumlah tenaga kerja yang diminta di pasar tenaga kerja ditentukan oleh factor-faktor seperti: upah, teknologi, produktivitas, kualitas tenaga kerja, fasilitas modal, produk domestic regional bruto, dan tingkat suku bunga.

Berdasarkan hasil pendataan Sensus Ekonomi 2016, total jumlah usaha selain usaha pertanian di Jawa Tengah sebanyak 4.174.210 usaha yang terdiri dari 42.483 Usaha Menengah Besar (UMB) dan 4.131.727 Usaha Mikro Kecil (UMK). Secara umum, jumlah usaha terbanyak terdapat di Kabupaten Banyumas, Cilacap dan Kota Semarang. Luas wilayah kondisi geografis secara perekonomian penduduk menjadi pendorong munculnya banyak usaha baru di Banyumas dan Cilacap, sedangkan Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dipenuhi dengan fasilitas dan infrastruktur penunjang meningkatnya usaha. Kondisi tersebut yang menyebabkan Kota Semarang memiliki jumlah Usaha Menengah Besar terbanyak yaitu sebanyak 7.794 usaha. Ini artinya 18,35% dari total UMB Jawa Tengah berposisi di Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa UMB Jawa Tengah masih mempunyai peran besar dalam menghadapi masalah pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja.

Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah melihat bahwa para investor asing tertarik untuk berinvestasi di Jawa Tengah dengan konsep usaha yang bersifat padat karya. Sumber daya manusia yang tersedia di Jawa Tengah sangat kompetitif dibandingkan daerah yang lain, diantaranya segi upah dan kemampuan. Separuh populasi masyarakat Jawa Tengah merupakan usia produktif untuk angkatan kerja. Sementara itu, melihat kondisi geografis Jawa Tengah, masih banyak daerah yang bisa dijadikan sebagai kawasan industri. Hal ini yang menjadi daya tarik investor asing untuk membangun perusahaan yang bersifat padat karya. Pembangunan perusahaan tersebut berarti menambah jumlah unit usaha pada suatu daerah. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha maka juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini didukung oleh penelitian Rochmani dkk (2016), bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah unit usaha industri di Jawa Tengah, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, juga meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2004 sebesar 14,9 juta jiwa, bertambah menjadi 16,2 juta jiwa di tahun 2013, atau meningkat sekitar 8,7%.

Sementara upah, walaupun tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Penelitian Antari dan Widanta (2016), menunjukkan bahwa apabila upah yang diberikan kepada tenaga kerja terlalu rendah, maka industri yang dijalankan akan kekurangan tenaga kerja sehingga produksi tidak akan berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa upah mempengaruhi dalam penyerapan tenaga kerja. Besar kecilnya jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan, yang selanjutnya juga akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi.

Penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah salah satunya di pengaruhi oleh tingkat upah. Upah juga mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja, jika semakin tinggi tingkat upah yang diterapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya kesempatan kerja. Sehingga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negative terhadap kesempatan kerja (Anas, 2014). Berdasarkan tabel 1.2 yang menunjukkan bahwa

jumlah UMP Jawa Tengah pada tahun 2011 adalah sebesar Rp.675.000, dan terus meningkat hingga tahun 2015 yang mencapai Rp.910.000.

Tabel.1.2 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jawa Tengah Tahun 2011-2015

No.	Tahun	UMK (Rupiah)
1.	2011	675000
2.	2012	765000
3.	2013	830000
4.	2014	910000
5.	2015	910000

Sumber : BPS Jawa Tengah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Besar dan Sedang di Provinsi Jawa Tengah.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Unit Usaha terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah?
2. Seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah?
3. Seberapa besar pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Secara rinci dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh Jumlah Unit Usaha terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Sebagai sarana pengembangan pengetahuan ilmiah dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi khususnya masalah penyerapan tenaga kerja.

2. Bagi Objek yang Diteliti

Diharapkan studi penelitian ini dapat membantu pemerintah khususnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pembangunan sehingga dapat menambah penyerapan tenaga kerja.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai bahan pertimbangan perusahaan atau instansi lain yang menghadapi permasalahan yang sama.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Teori Tenaga Kerja

Di dalam hukum perburuhan dan ketenagakerjaan terdapat beberapa istilah yang beragam seperti buruh, pekerja, karyawan, pegawai, tenaga kerja, dan lain-lain. Istilah buruh sejak dulu sudah populer dan kini masih sering dipakai sehingga sebutan untuk kelompok tenaga kerja yang sedang memperjuangkan program organisasinya. Istilah pekerja dalam praktek sering dipakai untuk menunjukkan status hubungan kerja. Badan Pusat Statistik mendefinisikan bekerja adalah melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (maksudnya seminggu sebelum pencacahan).

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working-age population*). Sedangkan menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja (Subijanto, 2011).

Tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Secara praksis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut dia hanya dibedakan oleh batas umur (Manulang, 2001).

Tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama

di Indonesia, batas umur minimal untuk tenaga kerja yaitu 15 tahun tanpa batas maksimal (Dumairy, 2000).

Pemilihan umur 15 tahun sebagai batas umur minimal adalah berdasarkan kenyataan penduduk umur 15 tahun di Indonesia sudah bekerja atau mencari kerja terutama di desa-desa. Demikian juga Indonesia tidak menetapkan batasan umur maksimal tenaga kerja karena belum adanya jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk yang menerima tunjangan hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian pegawai swasta. Bagi golongan ini pun pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka yang telah mencapai umur pensiun masih tetap bekerja untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga mereka tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Simanjuntak, 2001).

Jadi yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa yang sudah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah tertentu dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu atau dengan kata lain penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Dalam penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal tersebut antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, pengangguran dan tingkat bunga. Dalam dunia usaha tidaklah memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanyalah pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh tingkat upah, produktivitas tenaga kerja, modal dan pengeluaran non upah.

Menurut Zamrowi (2007), penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk berkerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah

bidang kegiatan usaha atau instansi di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Begitu pula dengan pasar tenaga kerja di Indonesia dapat dibedakan atas sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta umumnya berskala besar. Sebaliknya sektor informal merupakan sektor dengan kegiatan usaha umumnya sederhana, skala usaha relative kecil, umumnya sektor informal tidak berbadan hukum, usaha sektor informal sangat beragam. Dalam hal ini UMK merupakan salah satu indikasi dari sektor informal.

Proses dari usaha-usaha kesempatan kerja yang merupakan topic dalam penelitian ini dapat diwujudkan apabila pembinaan dan pembangunan industry kecil, sedang dan besar dapat berjalan dengan semestinya. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk dapat mendorong perekonomian rakyat. Pengertian dari penyerapan itu sendiri diartikan cukup luas, menyerap tenaga kerja dalam maknanya menghimpun orang atau tenaga kerja di suatu lapangan usaha untuk dapat sesuai dengan usaha itu sendiri. Proses penyerapan tenaga kerja ini juga tidak terlepas dari kesempatan yang tersedia di tengah-tengah masyarakat. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian yang dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan. Dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Daya beli tersebut diperoleh sebagai balas jasa atau factor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bungam sewa, dan balas jasa dari factor-faktor produksi lainnya, pendapatan atas factor produksi tersebut seluruhnya akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan.

Kaum klasik juga percaya dalam keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, akan digunakan secara penuh. Dengan demikian dibawah sistem yang didasarkan pada mekanisme pasar tidak ada pengangguran. Kalau tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah. Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih rendah ini akan menarik perusahaan untuk memperkerjakan mereka lebih banyak.

2.1.2 Teori Industri

a. Definisi Industri

Istilah industri berasal dari bahasa latin, yaitu *industria* yang artinya buruh atau tenaga kerja. Istilah industri sering digunakan secara umum dan luas, yaitu semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mencapai kesejahteraan. Definisi industri menurut Sukirno adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Kegiatan itu antara lain adalah pabrik tekstil, pabrik perakitan dan pabrik pembuatan rokok. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya (Sukirno, 2003).

Dalam pengertian yang sempit, industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Secara umum pengertian industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Selain itu industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia dan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri. Dari sudut pandang geografi, Industri sebagai suatu sistem, merupakan perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia.

Industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan pengertian industri atau industri pengolahan

adalah suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Dalam hal ini termasuk kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (*assembling*). Dalam istilah ekonomi, industri mempunyai dua pengertian. Pertama, industri merupakan himpunan perusahaan-perusahaan sejenis, contoh industri kertas berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil kertas. Kedua, industri adalah sektor ekonomi yang didalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi (Teguh, 2010).

Dalam pengertian kedua, kata industri sering disebut sektor industri pengolahan/manufaktur yaitu salah satu faktor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi. Pengertian industri adalah: Suatu unit atau kesatuan produk yang terletak pada suatu tempat tertentu yang meletakkan kegiatan untuk mengubah barang-barang secara mekanis atau kimia, sehingga menjadi barang (produk yang sifatnya lebih dekat pada konsumen terakhir), termasuk disini memasang bahagian dari suatu barang (*assembling*) (Sukirno, 2000).

Ketika satu negara telah mencapai tahapan dimana sektor industri sebagai *leading sector* maka dapat dikatakan negara tersebut sudah mengalami industrialisasi. Dapat dikatakan bahwa industrialisasi sebagai transformasi struktural dalam suatu negara. Oleh sebab itu, proses industrialisasi dapat didefinisikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi dimana terdapat kenaikan kontribusi sektor industri dalam permintaan konsumen, PDB, ekspor dan kesempatan kerja.

b. Industrialisasi

Industrialisasi dalam pengertian lain adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang mempunyai kaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai *leading sector*, maksudnya adalah dengan adanya perkembangan industri maka

akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya (Teguh, 2010).

Berdasarkan pengalaman di sebagian besar negara, dapat disimpulkan bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan pendapatan perkapita setiap tahun.

c. Klasifikasi Industri

Industri manufaktur merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan (Alhiriani, 2013).

Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya. Secara garis besar ada sembilan jenis industri di bawah ini:

- 1) Industri makanan, minuman dan tembakau.
- 2) Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit.
- 3) Industri kayu dan barang dari kayu, termasuk perabot rumah tangga.
- 4) Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan.
- 5) Industri kimia dan barang dari kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik.
- 6) Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batu bara.
- 7) Industri logam dasar.
- 8) Industri barang dari logam, mesin dan peralatannya.
- 9) Industri pengolahan lainnya.

Industri dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, yaitu kelompok industri besar mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang memiliki tenaga kerja 20-99 orang, dan industri kecil memiliki tenaga kerja 5- 19 orang, dan industri rumah tangga memiliki tenaga kerja 1-4 orang.

a. Industri Besar dan Sedang

Pengelompokan sektor industri di Indonesia dibedakan menjadi dua. Pertama, pembagian sektor industri pengolahan berdasarkan jenis produk yang dihasilkan. Berdasarkan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi Sembilan sub sektor.

Pengelompokan yang kedua adalah pembagian berdasarkan banyaknya tenaga kerja. Dengan pengelompokan ini sektor industri pengolahan dibedakan menjadi empat sub golongan, yaitu: industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Berdasarkan pengelompokan ini, industri besar sedang menghasilkan nilai tambah terbesar.

b. Industri Kecil dan Rumah Tangga

Dalam rangka menunjang pembangunan di sektor industri, pemerintah tidak hanya memperhatikan pertumbuhan industri besar dan sedang saja, melainkan juga membantu berkembangnya industri kecil dan rumah tangga. Industri kecil dan rumah tangga memegang peranan penting dalam pembangunan, khususnya negara-negara yang sedang membangun, karena industri ini dapat membuka lapangan kerja yang luas, membuka kesempatan usaha dan memperluas basis pembangunan. Dalam berbagai bidang, industri kecil dan rumah tangga juga meningkatkan ekspor. Dalam pembentukan PDRB, peranan industri kecil dan rumah tangga sebenarnya tidaklah terlalu besar, bahkan dapat dikatakan sangat kecil. Akan tetapi peranan sektor ini dalam penyerapan tenaga kerja cukup besar.

2.1.3 Jumlah Unit Usaha

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun

suatu badan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya. Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industry besar dan sedang pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industry besar dan sedang pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Teori klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap perusahaan menggunakan factor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap-tiap factor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan nilai marjinal dari factor produksi tersebut, atau dengan kata lain jumlah unit usaha menghasilkan lowongan pekerjaan yang besar (Simanjuntak, 2001).

Hal ini berarti penyerapan tenaga kerja juga bertambah. Jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industry ditambah maka permintaan tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja (Karib, 2012).

a. Hubungan Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Veronika (2003) yang menyatakan bahwa peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Menurut Wahyu (2004), penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh jumlah unit usaha. Hubungan antara jumlah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja adalah positif. Semakin meningkatnya jumlah unit usaha, maka akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, apabila jumlah unit usaha menurun maka akan mengurangi jumlah tenaga kerja.

2.1.4 Teori Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut teori Neo-Klasik, rasio antara modal dan tenaga kerja mengalami perubahan dengan mudah. Kombinasi antara jumlah modal dan tenaga kerja yang diperlukan dapat dengan mudah berubah sesuai dengan kuantitas produksi yang diinginkan. Apabila modal yang digunakan banyak, maka tenaga kerja yang digunakan sedikit. Sebaliknya, apabila modal yang digunakan sedikit, maka tenaga kerja yang digunakan banyak. Sehingga pada perekonomian pasar bebas terdapat fleksibilitas dalam menentukan alokasi modal dan tenaga kerja.

Dalam upaya pembangunan ekonomi, modal memiliki peran penting sebab akumulasi modal akan menentukan pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal dapat dilakukan melalui kegiatan investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi bertujuan untuk menambah barang-barang modal sehingga terjadi kenaikan output. Semakin meningkat output, semakin meningkat pula pendapatan. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat yang ditunjukkan oleh peningkatan PDRB.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), produk domestik regional bruto didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu daerah selama satu periode tertentu, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di daerah dalam satu periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Data Produk Domestik regional Bruto (PDRB) dapat diestimasi dengan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah, pada suatu periode (1 tahun). Sedangkan unit-unit produksi ini dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha, yaitu:

- 1) Pertanian
- 2) Pertambangan dan penggalian

- 3) Industri pengolahan
- 4) Listrik, gas dan air bersih
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan, hotel dan restoran
- 7) Pengangkutan dan komunikasi
- 8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- 9) Jasa-jasa

b. Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu wilayah, dalam jangka waktu tertentu (1 tahun). Komponen permintaan akhir tersebut meliputi:

- 1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung
- 2) Konsumsi pemerintah
- 3) Pembentukan modal tetap domestik bruto
- 4) Perubahan stok
- 5) Ekspor netto (expor dikurangi impor)

c. Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

Menurut pendekatan pendapatan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah semua balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi di suatu wilayah pada jangka waktu tertentu (1 tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga, modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencakup penyusutan dan pajak tak langsung netto. Jumlah semua komponen pendapatan ini persektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektoral (lapangan usaha).

Ada dua macam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yaitu:

- 1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (PDRB nominal) jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- 2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (PDRB riil) jumlah nilai produksi atau pendapatan atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap suatu tahun tertentu.

Ada berbagai macam cara yang digunakan untuk menghitung PDRB, cara-cara tersebut antara lain:

- 1) Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dapat dilakukan dengan dua metode langsung dan metode tidak langsung. Pada metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan perhitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Metode tidak langsung bisa digunakan apabila data yang diperlukan untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak tersedia.

- 2) Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB secara riil bukan karena adanya pengaruh harga. Ada 4 cara yang dikenal untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu (Paramitha, 2009):

- a) Revaluasi

Prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. Nilai tambahan bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara atas dasar harga konstan.

- b) Ekstrapolasi

Menurut ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar harga konstan tahun tertentu diperoleh dengan cara mengalihkan nilai tambah pada tahun dasar tertentu dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolarior dapat merupakan indeks dari masing-masing produksi yang dihasilkan ataupun

indeks dari berbagai indikator seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan lainnya, yang dianggap cocok dengan jenis kegiatannya. Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap output pada tahun dasar tertentu dengan mengalikan output atas dasar harga konstan dan rasio tetap nilai tambah terhadap output pada tahun dasar tertentu yang diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.

c) Deflasi

Menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga konstan tahun tertentu diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks yang sesuai.

d) Deflasi Berganda

Dalam deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dan biaya hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan sebagai deflator untuk perhitungan output atas dasar harga konstan biasanya merupakan indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan komoditinya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks harga dari komponen input terbesar.

a. Hubungan Produk Domestik regional Bruto (PDRB) dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan asumsi apabila nilai PDRB meningkat maka jumlah nilai output atau penjualan dalam seluruh unit ekonomi di suatu daerah akan meningkat. Semakin besar output atau penjualan yang dilakukan perusahaan maka akan mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja agar produksinya dapat ditingkatkan untuk mengejar peningkatan penjualan. Hal tersebut secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

2.1.5 Teori Upah Minimum

Dalam teori ekonomi upah minimum diartikan sebagai penyebaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha. Dengan demikian dalam teori ekonomi tidak dibedakan antara

penyebaran atas pekerja tetap dan professional dengan pembayaran atas jasa-jasa pekerja kasar dan tidak tetap. Di dalam teori ekonomi kedua jenis pembayaran pekerja tersebut dinamakan upah (Sukirno, 2003). Definisi upah menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 ayat (30) adalah: “*upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan*”.

Menurut golongan Keynesian baru, upah di dalam pasaran ditentukan secara kontrak diantara pekerja dan majikan atau pihak perusahaan dan tidak akan dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran tenaga kerja yang berlaku. Dengan perkataan lain, upah cenderung untuk bertahan pada tingkat yang sudah disetujui oleh perjanjian diantara tenaga kerja dan majikan atau perusahaan. Pengurangan permintaan tenaga kerja tidak akan menurunkan upah nominal dan sebaliknya penambahan permintaan tenaga kerja tidak akan secara cepat menaikkan upah nominal. Sepanjang kontrak kerja diantara tenaga kerja dan majikan adalah tetap atau konstan walaupun dalam pasaran tidak terdapat keseimbangan di antara permintaan dan penawaran tenaga kerja (Sukirno, 2003).

Teori ekonomi neoklasik menunjukkan, koreksi harga relative *input* (upah relative terhadap biaya capital) melalui liberalisasi ekonomi, akan mengarahkan alokasi factor produksi dengan menggunakan *input* yang berlebih, dalam hal ini tenaga kerja. Teori ekonomi ini juga menunjukkan, untuk negara yang tenaga kerjanya berlimpah seperti Indonesia, liberalisasi ekonomi cenderung meningkatkan nilai produksi marginal tenaga kerja relative terhadap total *output*, sementara pangsa balas jasa factor modal (keuntungan) cenderung akan menurun. Kenaikan pangsa nilai produksi marginal tenaga ini akan meningkatkan tingkah upah riil. Dengan demikian, sebetulnya tidak akan terjadi keraguan bahwa dalam pasar yang makin bebas, kenaikan *marginal product of labor* (produktivitas tenaga kerja) akan selalu diikuti kenaikan upah riil. Dengan demikian, penetapan upah minimum tidak berarti banyak, bahkan hanya menciptakan distorsi baru dalam perekonomian.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja. Kebijakan Upah Minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian kebijakan upah minimum adalah untuk menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas pekerja, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien (Sumarsomo, 2003).

Upah minimum adalah suatu penerimaan bulanan minimum (terendah) sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya. Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industry untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atas kerjanya (UU No. 13 tahun 2003). Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional.

a. Fungsi Upah

- 1) Untuk mengalokasikan secara efisien kerja manusia, menggunakan sumber daya manusia secara efisien untuk mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Untuk mengalokasikan secara efisien secara sumber daya manusia. Sistem pengupahan (kompensasi) adalah menarik dan menggerakkan tenaga kerja

kearah produktif, mendorong tenaga kerja dari perkerjaan yang produktif kepekerjaan yang lebih produktif.

- 3) Untuk menggunakan sumber tenaga manusia secara efisien. Pembayaran upah yang relative tinggi adalah mendorong, memanfaatkan tenaga kerja secara ekonomis, dan efisien. Dengan cara demikian pengusaha dapat memperoleh keuntungan dari tenaga kerja, tenaga kerja mendapat upah sesuai dengan keperluan hidupnya.
- 4) Mendorong stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi akibat alokasi pemakaian tenaga kerja secara efisien, sistem pengupahan diharapkan dapat merangsang, mempertahankan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.

b. Faktor yang Mempengaruhi dalam Upah Minimum

Tjiptoherijanto (2004), memaparkan dewasa ini paling tidak ada 5 (lima) factor utama yang diperhitungkan pemerintah dalam menetapkan tingkat upah minimum, yaitu:

- 1) Kebutuhan hidup minimum (KHM).
- 2) Indeks harga konsumen (IHK) atau tingkat inflasi.
- 3) Perluasan kesempatan kerja.
- 4) Upah pada umumnya yang berlaku secara regional.
- 5) Tingkat perkembangan perekonomian daerah setempat.

Dari lima factor di atas maka 3 faktor yaitu indeks harga konsumen, perluasan kesempatan kerja dan perkembangan perekonomian adalah factor makro, sedangkan dua factor lainnya yaitu kebutuhan hidup minimum dan regional pendapatan factor yang bersifat mikro. Dari sudut kebutuhan hidup pekerja, terdapat 2 (dua) komponen yang menntukan upah minimum, yaitu: kebutuhan hidup minimum (KHM) dan inflasi. Berbagai bahan yang ada dalam komponen KHM dinilai dengan harga yang berlaku, sehingga menghasilkan tingkat upah. Oleh karena harga sangat bervariasi antar daerah serta adanya situasu-situasi lokas yang tidak mungkin berlaku secara nasional. Maka tingkat upah minimum tersebut disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah atau lebih sering disebut dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Tjiptoherijanto, 2004).

c. Hubungan Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Secara teori, tidak ada pengaruh langsung antara upah terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi jika dikaitkan dengan tenaga kerja, upah akan mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dari sisi permintaan semakin tinggi upah, semakin kecil permintaan akan tenaga kerja karena upah merupakan biaya bagi suatu perusahaan. Sebaliknya, dari sisi penawaran, semakin tinggi upah, semakin banyak orang yang ingin bekerja. Semakin banyak tenaga kerja yang bekerja, semakin banyak output yang dihasilkan. Output yang tinggi akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, kebijakan mengenai upah mempunyai dua sisi yang jika salah satu sisi tidak diperhatikan akan merugikan.

Perusahaan atau pemberi kerja adalah pihak yang meminta jasa tenaga kerja yang akan dikombinasikan dengan factor produksi lainnya dalam upaya menghasilkan output. Sedangkan angkatan kerja adalah pihak yang menawarkan jasa keahlian dan kemampuannya kepada sektor riil maupun sektor lainnya, seperti pertanian, industry manufaktur, maupun jasa-jasa. Penentuan upah minimum oleh pemerintah dalam rangka memperhatikan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan produksi. Perlu diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli golongan penerima upah yang rendah, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. Kenaikan pendapatan muncul dari perubahan dalam tenaga, yaitu total jam kerja yang menghasilkan output yang lebih banyak. Perubahan produktivitas tersebut berarti perubahan dalam kenaikan penyerapan tenaga kerja (Lipsey, 1995).

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikannya dalam proses memproduksi barang atau jasa di perusahaan. Dengan demikian pekerja dan pengusaha mempunyai kepentingan langsung mengenai sistem dan kondisi pengupahan di setiap perusahaan. Pekerja dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu, para pekerja selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai

bagian dari biaya produksi, sehingga pengusaha biasanya sangat berhati-hati untuk meningkatkan upah (Jumriadi, 2010).

Upah berhubungan dengan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja, karena memiliki keterkaitan yang sangat erat. Apabila kualitas sumber daya manusia ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mempunyai keterampilan yang tinggi, maka upah yang akan diterima juga meningkat. Demikian pula jika upah yang diterima tenaga kerja sudah memadai, maka dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Jika upah meningkat maka produktivitas meningkat dan penyerapan tenaga kerja juga akan meningkat. Sebaliknya apabila produktivitas kerja rendah maka imbalan dalam bentuk upah juga rendah sehingga dapat menurunkan penyerapan tenaga kerja.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang penyerapan tenaga kerja dan factor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak dilakukan oleh banyak peneliti. Secara ringkas disajikan ringkasan penelitian-penelitian sejenis yang menjadi referensi dan inspirasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Risky Eka Putra (2012)

“Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh nilai investasi, nilai upah, dan nilai produksi secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Variable penelitian adalah nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi sebagai variable bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variable terikat. Metode analisis data adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan analisis Program SPSS 16 for windows. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh signifikan antara nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi dan terhadap penyerapan tenaga kerja industri mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif

nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industry mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.

2. Nenek Woyanti dan Ayu Wafi Lestari (2011)

“Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah Di Kabupaten Semarang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha, nilai investasi, dan upah terhadap permintaan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Kabupaten Semarang.
- b. Variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
- c. Variabel nilai investasi pada Industri kecil dan Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
- d. Variabel Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negative dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada industry Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
- e. Secara simultan atau bersama-sama variabel unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kabupaten mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.

3. Ariyanto (2010)

“Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB Jawa Tengah, nilai ekspor Jawa Tengah, pengeluaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah Tahun 1985-2007. Penelitian ini merupakan penelitian yang

berbentuk analisis kuantitatif mengenai factor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan data deret waktu (*time series*) antara tahun 1985-2007. Pencarian data terutama pada berbagai sumber atau instansi yang terkait dengan penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*).

Berdasarkan hasil analisis ECM (*Error Correction Model*), dapat disimpulkan bahwa: pertama, pertumbuhan PDRB ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua, pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negative terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Ketiga, nilai ekspor mempunyai pengaruh negative terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

4. Nelsen Diyan Pratama (2012)

“Analisis Pertumbuhan Tenaga Kerja pada Industri di Kabupaten Jepara”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada industry kecil serta mengetahui variable-variabel yang berpengaruh. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk analisis kuantitatif yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan data deret waktu (*time series*). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Variable yang digunakan adalah: variable terikat adalah penyerapan tenaga kerja, dan variable bebas dalam penelitian ini adalah investasi, usia usaha, dan jenis usaha. Dari hasil analisis yang menggunakan regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa sektor industry merupakan sektor yang berperan penting dalam menyumbang PDRB Kabupaten Jepara dan juga dalam penyerapan tenaga kerja terutama pada industry kecil.

5. Paul SP Hutagalung dan Budi Santoso (2013)

“Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Kesempatan kerja dipengaruhi Sektor Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Jawa tengah”. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis berapa besar pengaruh upah minimum

dan inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industry pengolahan besar dan sedang di Provinsi Jawa tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis metode regresi kuadrat terkecil atau *Ordinary Least Square* (OLS). Berdasarkan hasil perhitungan bahwa variable kesempatan kerja dipengaruhi oleh variable independen sebesar 16,1%. Berdasarkan uji parsial variable upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja dilihat dari nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan menggunakan derajat kepercayaan 0,05. Dengan t hitung sebesar 4,637 dan artinya jika upah minimum naik maka kesempatan kerja di kabupaten/kota di Jawa tengah meningkat. Variable inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja dilihat dari probabilitas lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,463. Untuk variable inflasi nilai t hitung sebesar 0,753 untuk lebih kecil dari t table maka mengindikasikan hipotesis alternative ditolak.

6. Dimas dan Nenek Woyanti (2009)

”Analisis Penyerapan tenaga Kerja di DKI Jakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh PDRB, tingkat upah riil dan investasi riil terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil analisis menunjukkan bahwa variable independen yaitu PDRB, tingkat upah riil secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variable dependen penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta.

7. Roni Akmal (2010)

“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tenaga Kerja di Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini guna mengetahui gambaran kondisi penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menjelaskan bahwa variable PDRB, investasi dan UMK secara signifikan berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Variable UMK ini bertolak belakang hipotesis dimana UMK berpengaruh negative terhadap penyerapan tenaga kerja kenaikan UMK

diduga lebih dirasakan pada kelompok tenaga kerja terdidik dan akibat tingginya permintaan tenaga kerja di sektor jasa-jasa, industry pengolahan dan pertanian.

8. Sidik Fajar (2012)

“Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan tenaga Kerja Sektor Industri dan Perdagangan, Hotel dan Restoran di Pulau Jawa Pada era Otonomi Daerah”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui pengaruh UMK riil, PDRB riil dan PMA terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industry dan perdagangan, hotel dan restoran di Pulau Jawa pada era otonomi daerah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda dengan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil analisis regresi panel data menunjukkan bahwa untuk penyerapan tenaga kerja sektor tiga variable berpengaruh signifikan yaitu UMK riil sektor industry, PDRB riil sektor industry dan PMA sektor industry. Satu variable yang tidak signifikan adalah PMDA dan tidak sesuai teori ini hal tersebut dikarenakan PMDN lebih besar dialokasikan pada investasi di subsector industry yang lebih padat modal yaitu subsector industry makanan. Pada model penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan hotel dan restoran semua variable memberikan pengaruh yang signifikan dan sesuai dengan teori. Kedua model penyerapan tenaga kerja menunjukkan bahwa provinsi Jawa Tengah memiliki efek tetap yang paling besar. Hal ini mengartikan bahwa provinsi tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menyerap tenaga kerja. Sedangkan provinsi DI Yogyakarta memiliki efek tetap yang paling kecil.

9. I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha (2015)

“Pengaruh Inflasi, PDRB, dan Upah Minimum terhadap Penyerapan tenaga Kerja di Provins Bali”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali periode tahun 1994-2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan aplikasi EViews. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama inflasi, PDRB dan upah minimum berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali. Demikian juga dengan $R^2 = 0,960$ berarti bahwa

96,0 persen penyerapan tenaga kerja di Provinsi Bali dipengaruhi oleh bersama-sama oleh inflasi, PDRB dan upah minimum sedangkan sisanya sebesar 4 persen dipengaruhi oleh variable lain yang tidak termasuk ke dalam model. Secara parsial inflasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sementara PDRB dan upah minimum positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Bali. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dalam mengatur laju inflasi dan penentuan upah minimum juga dirasakan perlu agar nantinya dapat mempengaruhi dan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja.

10. Arifatul Husna (2013)

“Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri di provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan sektor industry, investasi dan upah secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industry di Provinsi Jawa Tengah. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan secara serempak Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi dan Upah berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industry di Provinsi Jawa tengah. Demikian juga dengan $R^2=0,923388$ berarti bahwa 92 persen penyerapan tenaga kerja sektor industry di provinsi Jawa Tengah dipengaruhi sama-sama oleh variable laju pertumbuhan sektor industry, investasi dan upah sedangkan sisanya sebesar 8 persen dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Secara parsial laju pertumbuhan sektor industry tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industry, sementara investasi dan upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industry di Provinsi Jawa tengah. Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong sektor industry untuk lebih meningkatkan kegiatan agar dapat memacu dan mendukung laku pertumbuhan sektor industry. Hal ini dapat didukung dengan semakin meningkatnya investasi yang masuk di Provinsi Jawa Tengah, penetapan upah akan menjadi pertimbangan bagi pengusaha sehingga dalam penetapan upah pemerintah perlu memperhatikan kondisi perekonomian dan pasar tenaga kerja.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Risky Eka Putra	“Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”	1) Investasi 2) Upah 3) Nilai Produksi 4) Penyerapan tenaga kerja	Metode analisis data adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan analisis Program SPSS 16 for windows	Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh signifikan antara nilai investasi, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industry mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang
2.	Nenik Woyanti dan Ayu Wafi Lestari	“Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang	1) Permintaan Tenaga Kerja 2) Unit usaha 3) Nilai investasi 4) Upah minimu kabupaten	Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan atau bersama-sama variable unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kabupaten mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan menengah di Kabupaten berpengaruh negative dan signifikan terhadap tenaga kerja
3.	Ariyanto	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan	1) Penyerapan tenaga kerja 2) PDRB	Metode atau teknik pengUMKulan data dalam penelitian ini	Berdasarkan hasil analisis ECM (Error Correction Model), dapat

	Tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007)”	3) Pengeluaran pemerintah 4) Ekspor	adalah menggunakan teknik kepustakaan, datasekunder, dengan menggunakan data deret waktu dengan menggunakan ECM (Error Correction Model)	disimpulkan bahwa: 1) pertumbuhan PDRB ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran pemerintah mempunyai pengaruh negative terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Tengah dalam jangka panjang. Nilai ekspor mempunyai pengaruh negative terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.	
4.	Nelsen Diyan Pratama	“Analisis Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Kabupaten Jepara	1) Penyerapan tenaga kerja 2) Investasi 3) Usia usaha 4) Jenis industri	Alat analisis digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda	Sektor industry merupakan sektor yang berperan penting dalam menyumbang PDRB Kabupaten Jepara dan juga dalam penyerapan tenaga kerja terutama pada industry kecil. Dan di dalam penelitian

						bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan penyerapan tenaga kerja pada industry kecil serta mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh
5.	Paul SP hutagalung dan Budi Santoso	“Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Indflasi terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Jawa Tengah	1) Upah minimum 2) Inflasi 3) Kesempatan kerja	Penelitian ini menggunakan metodologi Ordinary Least Square (OLS)		Berdasarkan uji parsial variable upah minimum dan berpengaruh signifikan terhadap kesempatan tenaga kerja sedangkan inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja
6.	Dimas dan Nenek Woyanti	“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di DKI Jakarta”	1) PDRB 2) Tingkat riil upah 3) Investasi 4) Penyerapan tenaga kerja	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda		Variable independen yaitu PDRB (X1) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta, sedangkan tingkat upah riil (X2), investasi riil (X3) berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta
7.	Roni Akmal	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia”	1) PDRB 2) Investasi 3) UMK	Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda		Variable PDRB, UMK dan Investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia

8.	Sidik Fajar	“Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri dan perdagangan, Hotel dan Restoran di Pulau Jawa pada Era Otonomi Daerah	1) Upah 2) Penyerapan tenaga kerja	Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi berganda dengan pendekatan OLS (<i>Ordinary Least Square</i>)	Hasil analisis regresi panel data menunjukkan bahwa untuk penyerapan tenaga kerja sektor tiga variable berpengaruh signifikan yaitu UMK riil sektor industry, PDRB riil sektor industry dan PMA sektor industry, dan satu yang tidak signifikan adalah PMDA
9.	I Gusti Agung Indradewa dan Ketut Suardhika Natha	“Pengaruh Inflasi, PDRB dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi	1) Inflasi 2) PDRB 3) Upah minimum	Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian ini menghasilkan penelitian bahwa tingkat inflasi, PDRB dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Variable inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga. Dan variable PDRB secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga keja di Provinsi Bali.

10.	Arifatul Husna	“Pengaruh Laju Pertumbuhan Sektor Industri, Investasi, dan Upah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1980-2011	1) Pertumbuhan sektor industry 2) Investasi 3) Upah 4) Penyerapan tenaga kerja	Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda.	Pertumbuhan sektor industry, investasi, dan upah secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah.
-----	----------------	--	---	---	--

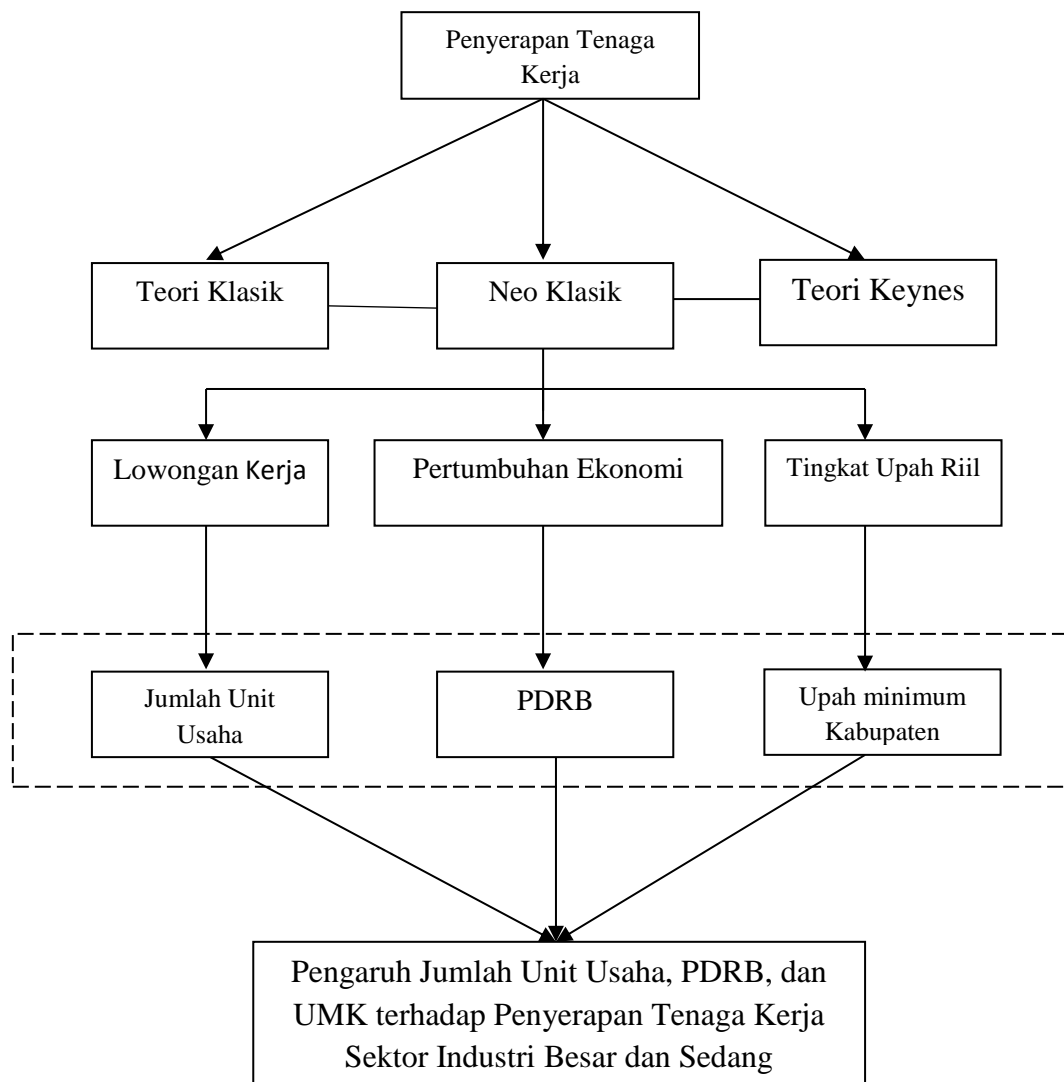
Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah unit usaha, PDRB, UMK dan penyerapan tenaga kerja.
2. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel.
3. Hasil penelitian ini menghasilkan secara simultan maupun parsial terdapat pengaruh signifikan antara jumlah unit usaha, PDRB dan UMK berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.
4. Objek penelitian serta periode penelitian yang dilakukan.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam mewujudkan penyerapan tenaga kerja yang terjamin di sektor industry dibutuhkan sumber dana maupun sumber daya manusia untuk mencapai hal tersebut. Untuk melihat pengaruh jumlah unit usaha, PDRB, dan UMK terhadap penyerapan tenaga kerja maka digunakan analisis Regresi Data Panel. Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai pedoman dan dapat menunjukkan alur pemikiran penelitian. Penelitian ini menggunakan uji analisis regresi data panel. Kerangka konseptual menggambarkan jumlah unit usaha (X1), PDRB (X2), dan UMK (X3) sebagai variable bebas dan ke tiga variable tersebut diasumsikan

memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Kerangka pemikiran konseptual ini menunjukkan bahwa jumlah unit usaha (X1), PDRB (X2), dan UMK (X3) secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Selain itu, kerangka pemikiran konseptual ini juga menunjukkan bahwa jumlah unit usaha (X1), PDRB (X2), dan UMK (X3) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y). Dalam kerangka teori di atas, maka dapat disusun kerangka penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian (Sumber: Olahan penulis, 2018)

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan landasan teori di atas dan penelitian yang relevan, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Unit Usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.
3. Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industry besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian eksplanatori. Yang dimaksud dengan eksplanatori adalah penelitian yang menggunakan suatu metode yang menjelaskan secara sistematis, flaktual dan akurat mengenai suatu obyek yang diteliti dan bertujuan untuk mencari ada dan tidaknya pola hubungan dan sifat hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menguji hipotesis bahkan menemukan teori baru (Nazir, 2003).

3.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini untuk mengetahui berapa banyak tenaga kerja yang terserap dalam sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah dengan variabel jumlah unit usaha, PDRB, UMK dan penyerapan tenaga kerja. Jawa Tengah merupakan provinsi yang unggul dengan berbagai sektor salah satunya sektor industri. Sektor industri merupakan sektor yang menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan keunggulan sektor tersebut tentunya penyerapan tenaga kerja juga lebih banyak pada sektor industri. Namun pada kenyataannya penyerapan tenaga kerja sektor industri masih belum maksimal dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, sehingga perlu dilakukan analisis mengenai perkembangan tenaga kerja.

3.3 Jenis dan Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data panel yang merupakan gabungan anatra data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*) pada periode waktu tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi online badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Adapun data yang digunakan adalah data panel dari tahun 2010-2015. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Data penyerapan tenaga kerja yang diperoleh dari jumlah orang yang bekerja pada sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah.

- b. Data jumlah unit usaha di sektor industri besar dan sedang di provinsi Jawa Tengah.
- c. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Data Upah Minimum Kabupaten (UMK) Jawa Tengah mencakup data upah minimum yang berlaku di Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi data panel. Data panel yaitu model ekonometri yang menyatukan antara deret waktu (*time series*) dan data kerat lintang (*cross section*), sehingga dalam data panel jumlah observasi merupakan hasil kali observasi deret waktu ($T > 1$) dengan observasi kerat lintang ($N < 1$). Melalui pengamatan berulang terhadap data *cross section*, analisis data panel memungkinkan seseorang dalam mempelajari dinamika perubahan dengan data *time series*. Oleh karena itu, data panel dapat menjelaskan dua macam informasi yaitu informasi *cross section* pada perbedaan antar subyek dan informasi *time series* yang merefleksikan perubahan pada subyek waktu (Gujarati, 2012). Adapun perbedaan umum estimasi data panel adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + e_{it},$$

Dimana:

N : banyaknya observasi

T : banyaknya waktu

N x T : banyak data panel

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (jumlah unit usaha, PDRB dan UMK) terhadap variabel terikat (penyerapan tenaga kerja) di provinsi Jawa Tengah, peneliti menggunakan metode analisis regresi panel data dengan model persamaan estimasi sebagai berikut:

$$PTK_{it} = \beta_0 + \beta_1 JUU_{it} + \beta_2 PDRB_{it} + \beta_3 UMK_{it} + e_{it}$$

Keterangan :

PTK = Penyerapan Tenaga Kerja (Jiwa)

t = Tahun yang diteliti 2010-2016

i = *Cross Section*

β_0	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi masing-masing variabel
JUU	= Jumlah Unit Usaha (Unit)
PDRB	= Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah)
UMK	= Upah Minimum Kabupaten (Rupiah)
e	= error

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui model ekonometrika dengan bantuan program Eviews 8, berikut ini tahap-tahap analisis yang dilakukan:

3.4.1 Pemilihan Metode Estimasi Data Panel

a. Metode Estimasi Data Panel

1) *Metode Pooled Least Square*

Pendekatan paling sederhana dalam pengolahan data panel adalah metode kuadrat terkecil biasa yang ditetapkan dalam data berbentuk *pool*. Metode ini mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu (*intersep* dan *slope* dianggap sama/konstan).

2) *Fixed Effect*

Metode pendekatan efek tetap (*fixed effect model*) merupakan model yang mengasumsikan koefisien *slope* konstan tetapi *intercept* bervariasi antar individu.

3) *Random Effect*

Dalam model efek acak (*random effect model*), parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke dalam *error*. Setiap individu memiliki keragaman konstanta dan berlaku bagi pengamatan di dalam individu tersebut.

b. Pemilihan Metode

1) Uji *Chow*

Pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *common effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan Uji *Chow*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Ho : *Common Effect*

Ha : *Fixed Effect*

2) Uji *Hausman*

Pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *random effect* atau *fixed effect* dapat dilakukan dengan Uji *Hausman*. Hipotesis yang dilakukan dalam *hausman test* adalah sebagai berikut:

Ho : *Random Effect*

Ha : *Fixed Effect*

Dasar penolakan terhadap hipotesis nol (Ho) adalah apabila nilai probabilitas $F < \alpha$ (0,05).

3) Uji *Langrange Multiple* (LM)

Pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan metode *random effect* atau *common effect*. Uji *Langrange Multiple* (LM) didasarkan pada distribusi *Chi-Squares* dengan derajat kebebasan (df) sebesar jumlah variabel independen. Pengambilan keputusannya adalah jika nilai LM hitung $>$ nilai kritis *Chi-Squares* maka Ho ditolak dan Ha diterima dengan hipotesis:

Ho : *Common Effect*

Ha : *Random Effect*

Jika *Lm* statistik lebih besar dari *Chi-Square Table* maka Ho ditolak sehingga model yang lebih tepat digunakan adalah *random effect*.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Pengujian normalitas dilakukan dengan maksud untuk melihat normal tidaknya data yang dianalisis. Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Nilai residual yang berdistribusi normal dapat diketahui dari bentuk kurva yang membentuk gambar lonceng yang kedua sisinya melebar sampai tak terhingga. Selain menggunakan grafik, uji normalitas juga dapat dilakukan dengan metode *Jarque-Bera* (Uji *JB*). Uji *JB* dilakukan dengan melihat nilai probabilitas *Jarque-Bera*. Menurut Winarno (2015), model regresi yang berdistribusi normal memiliki nilai probabilitas

$JB > 0,05$ ($\alpha = 0,05$). Sebaliknya apabila jika nilai probabilitas $< 0,05$ maka data berdistribusi tidak normal.

b. Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah suatu uji yang digunakan untuk melihat korelasi antar masing-masing variabel bebas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas maka dapat dilihat dari nilai korelasi antar dua variabel bebas tersebut. Apabila nilai korelasi kurang dari 0,8 maka variabel bebas tersebut tidak memiliki persoalan multikolinearitas, begitu juga sebaliknya.

c. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi penyebaran data yang tidak sama atau tidak samanya variasi sehingga uji signifikansi tidak valid. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual (kesalahan pengganggu) dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas (sama variannya). Salah satu cara mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah menggunakan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas terhadap nilai *absolut residual* (Winarno, 2015). Jika nilai probabilitas variabel bebas $< 0,05$ (taraf signifikan atau $\alpha = 0,05$) maka terjadi heteroskedastisitas, sebaliknya jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka terjadi homokedastis.

d. Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut deret waktu. Menurut Gujarati (2006), pengujian paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji statistik Durbin-Watson. Pengambilan keputusan pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang diperoleh dari tabel Durbin-Watson, yaitu nilai dL dan Du , dengan K = jumlah variabel bebas dan n = ukuran sampel. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Durbin Watson. Berikut ini adalah aturan penentuan Autokorelasi:

1) Jika $DW < DL$, maka H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi.

- 2) Jika $DW > 4-DL$, H_0 ditolak sehingga menyatakan terjadi autokorelasi negatif.
- 3) Jika $DU < DW < 4-DU$, H_0 diterima sehingga menyatakan tidak terjadi autokorelasi positif atau negatif.
- 4) Jika DW terletak diantara DL dan DU atau antara $(4-DU)$ dan $(4-DL)$ maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Nilai DU dan DL dapat diperoleh dengan tabel statistik Durbin-Watson yang bergantung banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen.

3.4.3 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. Uji hipotesis yang dilakukan adalah:

a. Uji t (Uji Koefisien Regresi secara Individual)

Koefisien regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan membandingkan nilai *probability* dengan taraf signifikansinya. Pengujian ini dilakukan dengan rumus dari (Gujarati, 2012) sebagai berikut:

$$t = \frac{b_i}{Se_{b_i}}$$

Keterangan :

t = t hitung (pengujian secara parsial)

b_i = Koefisien regresi dari variabel i

Se_{b_i} = Standar error dari b_i

Rumusan hipotesa :

1. $H_0 : b_1 = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat;
2. $H_1 : b_1 \neq 0$, artinya secara parsial ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat;

Kriteria pengujian :

- a. jika probabilitas t hitung $\leq \alpha$ ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya bahwa seluruh variabel bebas ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat;
 - b. jika probabilitas t hitung $> \alpha$ ($\alpha = 5\%$), maka H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya bahwa seluruh variabel bebas tidak ada pengaruh secara nyata terhadap variabel terikat.
- b. Uji F (Koefisien Regresi secara Keseluruhan)

Uji F (Uji Simultan) digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Uji F disebut juga uji kelayakan model yang digunakan untuk mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak disini berarti bahwa model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F dapat dilakukan dengan melihat Prob (*F-statistic*). Apabila nilai Prob (*F-statistic*) $< 0,05$ ($\alpha = 0,05$) maka koefisien regresi secara keseluruhan signifikan mempengaruhi variabel terikat dan sebaliknya. Nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2(k)}{(1-R^2)(n-k-1)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah Parameter yang Diestimasi Termasuk Konstanta

n = Jumlah Sampel

- c. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model menjelaskan variabel terikat yang dihitung. Nilai R^2 yang kecil/mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas atau kecil. Nilai R^2 yang besar

mendekati 1, berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel tersebut.

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikat. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya titik pusat dari suatu penelitian. Sementara itu, maksud dari variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau dipengaruhi oleh variabel bebas (Arikunto, 2010). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Jumlah unit usaha, PDRB, dan UMK.

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Tenaga kerja adalah penduduk di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang bekerja atau diserap oleh sektor industri besar dan sedang yang dinyatakan dalam jiwa/Tahun.
2. Jumlah unit usaha adalah jumlah industri besar dan sedang dari suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, dinyatakan unit/Tahun.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah data statistik yang merangkum perolehan nilai tambah dari seluruh kegiatan ekonomi di wilayah provinsi pada satu periode tertentu. PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga konstan yang dinyatakan dalam Milyar Rupiah/Tahun.
4. Upah minimum merupakan batas bawah upah yang ditetapkan pemerintah bagi para pekerja paling rendah (UMK), dinyatakan dalam Rupiah/Bulan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Jumlah unit usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah usaha yang ada didalam suatu wilayah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya PDRB yang ada di dalam suatu wilayah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
3. Upah Minimum Kabupaten berpengaruh signifikan dan positif terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri besar dan sedang di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya UMK yang ada di dalam suatu wilayah akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dapat disarankan sebagai berikut;

1. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat lebih meningkatkan atau mengembangkan jumlah usaha yang ada yaitu melalui pendataan dan pemetaan daerah mana yang cocok untuk pengembangan kawasan industri, untuk itu pemerintah perlu bersinergi dengan pengusaha khususnya dalam hal meningkatkan jumlah industri yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga akan menciptakan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memperluas pembangunan di setiap kabupaten/kota sehingga industri dapat berkembang dengan baik pada setiap daerah, apabila industri dapat merata maka arus urbanisasi dapat ditekan dan penumpukan jumlah penduduk pada daerah tertentu tidak terjadi sehingga

penyerapan tenaga kerja dapat maksimal serta pada PDRB dapat dinikmati seluruh kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diharapkan memperbaiki sistem pengupahan guna mendorong penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dengan cara meningkatkan upah tenaga kerja. Peningkatan upah ini bisa dilakukan dengan memberikan bonus kepada tenaga kerja. Dengan cara tersebut diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, tanpa mengorbankan kepentingan perusahaan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian yang telah penulis lakukan dengan melihat factor-faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Akmal, R. 2010. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Anas, M. 2014. Analisis penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.
- Antari, A. A. I. I. D, dan A. A. B. P. Widanta. 2016. Determinan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Perak Di Kabupaten Klungkung. *EP Unud.*, 5(9) : 902-936.
- Ariyanto. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Propinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007. *Skripsi*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Arsyad, L. 1999. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja Tahun 2002-2016*. Surabaya, BPS Jawa Tengah.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta, BPFE.
- Dimas, dan W. Nenek. 2009. Penyerapan tenaga Kerja di DKI Jakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. 16(1): 32-41.
- Dumairy. 2000. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta, Erlangga.
- Fajar, S. 2012. Dampak Kebijakan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Dan Perdagangan, Hotel Dan Restoran Di Pulau Jawa Pada Era Otonomi Daerah. *Skripsi*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Gujarati, D. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 2: Edisi Kelima*. Jakarta: Salemba Empat.

- Haryani, S. 2002. *Hubungan Industrial di Indonesia*. Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Hutagalung, SP Paul. 2013. Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Jawa Tengah. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indradewa, I.G.A, dan K. S. Natha. 2015. Pengaruh Inflasi, Pdrb dan Upah Minimum Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 4 (8) : 923-950
- Jhinga, L. M. 2000. *Ekonomi Pembangunan Perencanaan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Jumriadi. 2010. Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Upah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sulawesi Selatan Periode 1999-2008. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Lipsey, G. R. 1995. *Economics*. Terjemahan, Edisi Kesepuluh. Jakarta, Binapura Aksara.
- Mankiw, N. G. 2003. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta, Erlangga.
- Manulang, S. H. 2001. *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nata, B. F. 2015. Pengaruh UMK, Jumlah Usaha, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Industri Di Kabupaten Banyuwangi. *Skripsi*. Jember : Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Nazir, Mohammad. 2003. *Metodologi Penelitian*. Cetakan Keempat. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prabowo, Azis. 1997. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Subsektor Industri Kecil di Kabupaten Tegal. *Skripsi*. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Pratama, N.D. 2012. Analisis Pertumbuhan Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Kab. Jepara. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Putra, Rizky Eka. 2012. Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan

- Podurungan Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Rochmani, T. S., Y. Purwaningsih., dan A. Suryantoro. 2016. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Saektor Industri di Provinsi Jawa Tengah*. *JIEP*, 16(2) : 50-61.
- Saputri, O. D. 2011. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Salatiga. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Simanjuntak, P. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Subijanto. 2011. Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(6) : 705-718.
- Sukirno, S. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. 2003. *Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Jakarta, ANDI.
- Tjiptoherijanto, P. 2004. *Upah, Jaminan social dan Perlindungan Anak*. Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Todaro, M. 2000. *Ekonomi untuk Negara Berkembang Suatu Pengantar Tentang Prinsip dan Kebijakan Pembangunan Edisi Ketiga*; Jakarta, Bumi Aksara
- Veronica, N. 2003. Analisis Penyerapan tenaga Kerja Pada Subsektor Industri Kecil dan Kajian Rumah Tangga Di Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Wahyu, T. 2004. Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil dalam Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan*.
- Wahyuningsih, B. 2017. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2015. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Winarto, W. W. 2015. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Wirakarkusuma, A. 1996. *Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta, LPFE Universitas Indonesia.

Woyanti, Nenek dan Ayu Wafi Lestari. 2011. Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Investasi dan Upah Minimum Terhadap Permintaan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang. *Thesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Zamrowi, M. taufik, 2007. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil. *Thesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.

LAMPIRAN 1. REKAPITULASI DATA SEKUNDER PENELITIAN

Kabupaten/kota	Tahun	Jumlah Unit Usaha	PDRB	UMK	TK
Kab. Cilacap	2010	28	75099089.89	698333.33	11635
Kab. Cilacap	2011	25	78156818.82	718666.67	9774
Kab. Cilacap	2012	26	79702237.61	773000	7860
Kab. Cilacap	2013	22	81022670.26	986000	9828
Kab. Cilacap	2014	22	83391500.18	1125000	6496
Kab. Cilacap	2015	25	88357606.68	1287000	6717
Kab. Banyumas	2010	68	23016943.39	670000	4754
Kab. Banyumas	2011	66	24538595.63	750000	4978
Kab. Banyumas	2012	62	25982158.22	795000	4952
Kab. Banyumas	2013	52	27793138.47	877500	5800
Kab. Banyumas	2014	54	29367687.4	1000000	5386
Kab. Banyumas	2015	102	31164876.4	1100000	6494
Kab. Purbalingga	2010	90	10858631.52	695000	40507
Kab. Purbalingga	2011	87	11474221.22	765000	41814
Kab. Purbalingga	2012	89	12138445.34	818500	45652
Kab. Purbalingga	2013	84	12778311.23	896500	43568
Kab. Purbalingga	2014	90	13397712.78	1023000	42737
Kab. Purbalingga	2015	96	14130612.26	1101600	48932
Kab. Banjarnegara	2010	24	9439359.002	662000	3647
Kab. Banjarnegara	2011	22	9952403.663	730000	4210
Kab. Banjarnegara	2012	18	10473363.43	765000	3387
Kab. Banjarnegara	2013	18	11043083.01	835000	3254
Kab. Banjarnegara	2014	18	11629845.85	920000	7112
Kab. Banjarnegara	2015	21	12266046.35	1112500	4892
Kab. Kebumen	2010	186	12311421.83	700000	8932
Kab. Kebumen	2011	226	13068985.5	727500	9827
Kab. Kebumen	2012	206	13707057.24	770000	10024
Kab. Kebumen	2013	203	14333333.5	835000	9333
Kab. Kebumen	2014	203	15163091.84	975000	8637
Kab. Kebumen	2015	203	16115554.01	1157500	8378
Kab. Purworejo	2010	14	8513490.56	719000	3029
Kab. Purworejo	2011	14	8993814.304	755000	3267
Kab. Purworejo	2012	17	9406242.926	809000	3388
Kab. Purworejo	2013	14	9870969.952	849000	3393

Kabupaten/kota	Tahun	Jumlah Unit Usaha	PDRB	UMK	TK
Kab. Purworejo	2014	14	10312937.79	910000	3437
Kab. Purworejo	2015	14	10862645.98	1165000	3509
Kab. Wonosobo	2010	57	9005925.539	715000	6198
Kab. Wonosobo	2011	65	9489550.455	775000	6837
Kab. Wonosobo	2012	65	9935905.322	825000	6968
Kab. Wonosobo	2013	84	10333757.05	880000	9274
Kab. Wonosobo	2014	105	10828168.68	990000	8370
Kab. Wonosobo	2015	134	11334080.04	1166000	9656
Kab. Magelang	2010	76	14363230.57	752000	12162
Kab. Magelang	2011	74	15323039.48	802500	12595
Kab. Magelang	2012	66	16071142.55	870000	15760
Kab. Magelang	2013	71	17020755.61	942000	14742
Kab. Magelang	2014	72	17936288.38	1152000	14521
Kab. Magelang	2015	75	18864651.97	1255000	15782
Kab. Boyolali	2010	104	13721701.47	748000	17129
Kab. Boyolali	2011	94	14592026.26	800500	23258
Kab. Boyolali	2012	77	15369974.36	836000	25904
Kab. Boyolali	2013	75	16266498.68	895000	24870
Kab. Boyolali	2014	77	17148350.76	1116000	26478
Kab. Boyolali	2015	100	18170383.95	1197800	39116
Kab. Klaten	2010	279	17002049.66	735000	17223
Kab. Klaten	2011	276	18071350.51	766022	16856
Kab. Klaten	2012	270	19102402.71	812000	18683
Kab. Klaten	2013	277	20241429.01	871500	20819
Kab. Klaten	2014	283	21424522.36	1026600	25047
Kab. Klaten	2015	291	22558976.15	1170000	26021
Kab. Sukoharjo	2010	138	16357221.65	769500	49775
Kab. Sukoharjo	2011	136	17319638.62	790500	45490
Kab. Sukoharjo	2012	138	18342247.26	843000	46844
Kab. Sukoharjo	2013	121	19401889.44	902000	51294
Kab. Sukoharjo	2014	127	20449009.84	1150000	46237
Kab. Sukoharjo	2015	153	21612078.19	1223000	57181
Kab. Wonogiri	2010	12	13310571.1	695000	1565
Kab. Wonogiri	2011	15	13786711.34	730000	1756
Kab. Wonogiri	2012	15	14605088.22	775000	1523
Kab. Wonogiri	2013	14	15303280.47	830000	1273

Kabupaten/kota	Tahun	Jumlah Unit Usaha	PDRB	UMK	TK
Kab. Wonogiri	2014	15	16107795.17	954000	1429
Kab. Wonogiri	2015	16	16977198.56	1101000	2180
Kab. Karanganyar	2010	153	16393788.72	761000	42504
Kab. Karanganyar	2011	153	17205063.88	801500	49785
Kab. Karanganyar	2012	153	18219456.66	846000	54305
Kab. Karanganyar	2013	130	19256516.28	896500	48256
Kab. Karanganyar	2014	135	20262444.42	1060000	47833
Kab. Karanganyar	2015	149	21286287.14	1226000	49997
Kab. Sragen	2010	47	15832557.66	724000	17054
Kab. Sragen	2011	47	16870231.27	760000	20069
Kab. Sragen	2012	48	17902104.86	810000	21751
Kab. Sragen	2013	51	19102181.74	864000	26201
Kab. Sragen	2014	50	20169824.79	960000	24704
Kab. Sragen	2015	69	21390871.2	1105000	24477
Kab. Grobogan	2010	19	12766021.74	687500	2747
Kab. Grobogan	2011	20	13172711.96	735000	2362
Kab. Grobogan	2012	19	13842047.14	785000	1944
Kab. Grobogan	2013	20	14474728.93	842000	2258
Kab. Grobogan	2014	26	15064456.66	935000	2650
Kab. Grobogan	2015	30	15962619.43	1160000	3120
Kab. Blora	2010	22	10149079.63	742000	2154
Kab. Blora	2011	13	10597723.01	816200	1786
Kab. Blora	2012	11	11116865.91	855500	1762
Kab. Blora	2013	13	11712504.85	932000	1781
Kab. Blora	2014	23	12227201.29	1009000	2397
Kab. Blora	2015	30	12882587.7	1180000	2815
Kab. Rembang	2010	88	8373546.874	702000	5787
Kab. Rembang	2011	106	8808302.776	757600	5911
Kab. Rembang	2012	66	9277163.235	816000	4407
Kab. Rembang	2013	56	9780750.393	896000	4797
Kab. Rembang	2014	60	10284274.36	985000	6072
Kab. Rembang	2015	63	10850269.2	1120000	5994
Kab. Pati	2010	187	18782546.64	733000	24693
Kab. Pati	2011	223	19893325.24	769550	25502
Kab. Pati	2012	209	21072328.7	837500	29774
Kab. Pati	2013	202	22329693.98	927600	29578

Kabupaten/kota	Tahun	Jumlah Unit Usaha	PDRB	UMK	TK
Kab. Pati	2014	210	23365213.99	1013027	29112
Kab. Pati	2015	231	24770325.07	1176500	29401
Kab. Kudus	2010	169	52933496.31	775000	96468
Kab. Kudus	2011	166	55175794.89	840000	96113
Kab. Kudus	2012	173	57440810.51	889000	100841
Kab. Kudus	2013	182	59944556.52	990000	146045
Kab. Kudus	2014	182	62600680.87	1150000	153332
Kab. Kudus	2015	186	65029937.5	1380000	151433
Kab. Jepara	2010	399	13347321.26	702000	69412
Kab. Jepara	2011	312	14004325.03	758000	46798
Kab. Jepara	2012	277	14824995.87	800000	33758
Kab. Jepara	2013	254	15623738.87	875000	30562
Kab. Jepara	2014	264	16374715.21	1000000	30251
Kab. Jepara	2015	266	17210365.92	1150000	33738
Kab. Demak	2010	58	11647735.65	813400	12464
Kab. Demak	2011	55	12275702.69	847987	13494
Kab. Demak	2012	61	12823227.04	893000	22544
Kab. Demak	2013	72	13499226.47	995000	25959
Kab. Demak	2014	79	14078419.8	1280000	26030
Kab. Demak	2015	95	14912999.6	1535000	29610
Kab. Semarang	2010	116	21572136.87	824000	68057
Kab. Semarang	2011	117	22925456.8	880000	69997
Kab. Semarang	2012	112	24306718.35	941600	76852
Kab. Semarang	2013	124	25758121.08	1051000	91901
Kab. Semarang	2014	135	27264112.96	1208200	100031
Kab. Semarang	2015	153	28768327.3	1419000	105479
Kab. Temanggung	2010	27	9710199.268	709500	17467
Kab. Temanggung	2011	35	10301569.79	779000	15932
Kab. Temanggung	2012	44	10740983.02	866000	18494
Kab. Temanggung	2013	59	11299342.97	940000	17536
Kab. Temanggung	2014	58	11867679.59	1050000	23238
Kab. Temanggung	2015	61	12489394.54	1178000	19244
Kab. Kendal	2010	44	18798278.37	780000	19273
Kab. Kendal	2011	47	20032434.32	843750	16409
Kab. Kendal	2012	56	21075717.33	893000	20104
Kab. Kendal	2013	55	22386123.5	953100	21866

Kabupaten/kota	Tahun	Jumlah Unit Usaha	PDRB	UMK	TK
Kab. Kendal	2014	59	23536834.39	1206000	21984
Kab. Kendal	2015	63	24762325.36	1383450	24201
Kab. Batang	2010	55	9447328.384	745000	13324
Kab. Batang	2011	54	10025044.65	805000	13287
Kab. Batang	2012	54	10488456.63	880000	13462
Kab. Batang	2013	56	11104696.78	970000	14678
Kab. Batang	2014	59	11693897.06	1146000	14891
Kab. Batang	2015	88	12328239.23	1270000	16801
Kab. Pekalongan	2010	317	10254315.35	760000	25165
Kab. Pekalongan	2011	310	10834201.09	810000	27048
Kab. Pekalongan	2012	315	11354849.9	873000	26841
Kab. Pekalongan	2013	282	12034805.89	962000	24327
Kab. Pekalongan	2014	315	12630368.82	1145000	25466
Kab. Pekalongan	2015	324	13234564.04	1271000	24925
Kab. Pemalang	2010	150	11282196.1	675000	6931
Kab. Pemalang	2011	128	11847199.06	725000	7719
Kab. Pemalang	2012	129	12477235.25	793000	7530
Kab. Pemalang	2013	112	13172063.61	908000	7968
Kab. Pemalang	2014	115	13898669.42	1066000	6428
Kab. Pemalang	2015	116	14673696.23	1193400	6376
Kab. Tegal	2010	98	15106509.91	687000	11542
Kab. Tegal	2011	98	16071820.41	725000	12427
Kab. Tegal	2012	96	16912249.74	795000	15447
Kab. Tegal	2013	92	18050291.97	850000	12981
Kab. Tegal	2014	93	18958841.04	1000000	15323
Kab. Tegal	2015	95	19999475.45	1155000	15422
Kab. Brebes	2010	39	20158107.77	681000	3533
Kab. Brebes	2011	46	21498422.48	717000	3451
Kab. Brebes	2012	45	22482262.67	775000	3669
Kab. Brebes	2013	92	23812056.92	859000	4908
Kab. Brebes	2014	95	25074171.51	1000000	6615
Kab. Brebes	2015	103	26572834.89	1166550	8561
Kota Magelang	2010	26	4010718.179	745000	2029
Kota Magelang	2011	25	4255662.206	795000	2397
Kota Magelang	2012	24	4484268.081	837000	2192
Kota Magelang	2013	26	4755092.203	915900	2349

Kabupaten/kota	Tahun	Jumlah Unit Usaha	PDRB	UMK	TK
Kota Magelang	2014	25	4992112.822	1145000	2679
Kota Magelang	2015	26	5247341.267	1211000	2688
Kota Surakarta	2010	171	21469551.3	785000	12566
Kota Surakarta	2011	173	22848439.42	826252	13157
Kota Surakarta	2012	172	24123781.59	864450	15427
Kota Surakarta	2013	139	25631681.32	974000	14528
Kota Surakarta	2014	139	26984358.61	1170000	14308
Kota Surakarta	2015	148	28453493.87	1222400	15650
Kota Salatiga	2010	23	5845475.807	803185	7730
Kota Salatiga	2011	27	6230219.493	843469	7965
Kota Salatiga	2012	26	6574907.259	901396	8953
Kota Salatiga	2013	32	6989045.499	1209100	9831
Kota Salatiga	2014	32	7378042.816	1423500	10642
Kota Salatiga	2015	38	7759181.618	1287000	10709
Kota Semarang	2010	314	80824099.97	939756	81059
Kota Semarang	2011	303	86142966.7	961323	82344
Kota Semarang	2012	325	91282029.07	991500	88445
Kota Semarang	2013	300	96985402.04	980000	84277
Kota Semarang	2014	328	103109874.9	1165000	98032
Kota Semarang	2015	475	109110689.6	1685000	116982
Kota Pekalongan	2010	204	4624260.081	760000	10304
Kota Pekalongan	2011	195	4878332.219	810000	10938
Kota Pekalongan	2012	179	5151813.524	895500	11112
Kota Pekalongan	2013	172	5456196.88	860000	10769
Kota Pekalongan	2014	173	5755282.265	1044000	10595
Kota Pekalongan	2015	180	6043095.725	1291000	10704
Kota Tegal	2010	85	6895713.334	700000	6079
Kota Tegal	2011	97	7341540.164	735000	6478
Kota Tegal	2012	93	7650479.564	795000	6528
Kota Tegal	2013	110	8084175.726	914275.68	7547
Kota Tegal	2014	116	8491325.366	1066603.43	8194
Kota Tegal	2015	159	8953879.556	1206000	9125

LAMPIRAN 2. HASIL UJI ANALISIS

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	62.805216	(34,172)	0.0000
Cross-section Chi-square	545.238189	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: PTK
Method: Panel Least Squares
Date: 11/06/18 Time: 06:51
Sample: 2010 2015
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	203369.6	212294.5	0.957960	0.3394
JUU	13.39120	7.591677	1.763931	0.0795
PDRB	-12047.06	13148.33	-0.916242	0.3608
UMK	0.019498	0.006655	2.929920	0.0039
R-squared	0.421640	Mean dependent var		23358.91
Adjusted R-squared	0.413217	S.D. dependent var		28170.48
S.E. of regression	21579.09	Akaike info criterion		22.81570
Sum squared resid	9.59E+10	Schwarz criterion		22.87946
Log likelihood	-2391.649	Hannan-Quinn criter.		22.84147
F-statistic	50.05979	Durbin-Watson stat		0.162470
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	19.202084	3	0.0002

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
JUU	13.391195	18.281656	2.539362	0.0021
PDRB	12047.05602	9 18769.794794	149512138.87	0.0117
UMK	0.019498	0.005409	0.000033	0.0139

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PTK

Method: Panel Least Squares

Date: 11/06/18 Time: 06:52

Sample: 2010 2015

Periods included: 6

Cross-sections included: 35

Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-350701.3	39277.64	-8.928778	0.0000
JUU	71.98129	14.55032	4.947060	0.0000
PDRB	20913.92	2439.294	8.573761	0.0000
UMK	0.020506	0.008030	2.553730	0.0114

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.956887	Mean dependent var	23358.91
Adjusted R-squared	0.947613	S.D. dependent var	28170.48
S.E. of regression	6447.738	Akaike info criterion	20.54314
Sum squared resid	7.15E+09	Schwarz criterion	21.14881
Log likelihood	-2119.029	Hannan-Quinn criter.	20.78799
F-statistic	103.1761	Durbin-Watson stat	0.774237
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Uji *Fixed Effect*

Dependent Variable: PTK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/06/18 Time: 06:53
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-350701.3	39277.64	-8.928778	0.0000
JUU	71.98129	14.55032	4.947060	0.0000
PDRB	20913.92	2439.294	8.573761	0.0000
UMK	0.020506	0.008030	2.553730	0.0114

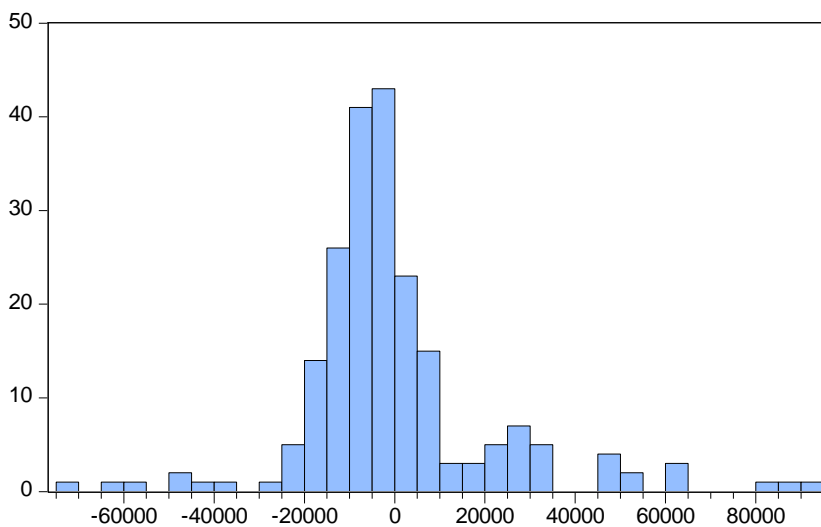
Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.956887	Mean dependent var	23358.91
Adjusted R-squared	0.947613	S.D. dependent var	28170.48
S.E. of regression	6447.738	Akaike info criterion	20.54314
Sum squared resid	7.15E+09	Schwarz criterion	21.14881
Log likelihood	-2119.029	Hannan-Quinn criter.	20.78799
F-statistic	103.1761	Durbin-Watson stat	0.774237
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals	
Sample 2010 2015	
Observations 210	
Mean	1.19e-12
Median	-3590.521
Maximum	92133.72
Minimum	-71411.72
Std. Dev.	21712.79
Skewness	1.217583
Kurtosis	7.579161
Jarque-Bera	235.3641
Probability	0.000000

Uji Multikolinearitas

	JUU	PDRB	UMK
JUU	1.000000	0.248627	0.113653
PDRB	0.248627	1.000000	0.230872
UMK	0.113653	0.230872	1.000000

Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: REABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/06/18 Time: 06:59
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2727.434	5158.794	-0.528696	0.5976
JUU	15.23318	10.06181	1.513960	0.1316
PDRB	0.000346	5.66E-05	6.111068	0.0000
UMK	0.008358	0.005558	1.503975	0.1341
R-squared	0.215814	Mean dependent var		13835.24
Adjusted R-squared	0.204393	S.D. dependent var		16706.75
S.E. of regression	14901.89	Akaike info criterion		22.07523
Sum squared resid	4.57E+10	Schwarz criterion		22.13898
Log likelihood	-2313.899	Hannan-Quinn criter.		22.10100
F-statistic	18.89755	Durbin-Watson stat		0.234059
Prob(F-statistic)	0.000000			

Uji Autokorelasi

Dependent Variable: PTK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 11/06/18 Time: 06:53
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (balanced) observations: 210

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-350701.3	39277.64	-8.928778	0.0000
JUU	71.98129	14.55032	4.947060	0.0000
PDRB	20913.92	2439.294	8.573761	0.0000
UMK	0.020506	0.008030	2.553730	0.0114

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.956887	Mean dependent var	23358.91
Adjusted R-squared	0.947613	S.D. dependent var	28170.48
S.E. of regression	6447.738	Akaike info criterion	20.54314
Sum squared resid	7.15E+09	Schwarz criterion	21.14881
Log likelihood	-2119.029	Hannan-Quinn criter.	20.78799
F-statistic	103.1761	Durbin-Watson stat	0.774237
Prob(F-statistic)	0.000000		

N = 210

K = 3

dL = 1,7382

dU = 1,7990

4 – dL = 2,2618

4 – dU = 2,201

CROSS ID

	CROSSID	Effect
1	Kab. Cilacap	-95100.64
2	Kab. Banyumas	-26336.54
3	Kab. Purbalingga	31382.67
4	Kab. Banjarnegara	-5038.778
5	Kab. Kebumen	-6782.977
6	Kab. Purworejo	-4542.322
7	Kab. Wonosobo	-1457.690
8	Kab. Magelang	-3639.810
9	Kab. Boyolali	9037.671
10	Kab. Klaten	-3596.327
11	Kab. Sukoharjo	27765.75
12	Kab. Wonogiri	-13440.41
13	Kab. Karanganyar	27165.95
14	Kab. Sragen	2141.891
15	Kab. Grobogan	-11564.47
16	Kab. Blora	-9910.898
17	Kab. Rembang	-2912.108
18	Kab. Pati	1751.614
19	Kab. Kudus	48183.58
20	Kab. Jepara	22263.78
21	Kab. Demak	8302.297
22	Kab. Semarang	55407.33
23	Kab. Temanggung	8482.928
24	Kab. Kendal	-4031.482
25	Kab. Batang	4351.728
26	Kab. Pekalongan	11626.60
27	Kab. Pemasang	-6305.426
28	Kab. Tegal	-5475.653
29	Kab. Brebes	-21652.21
30	Kota Magelang	1108.719
31	Kota Surakarta	-15755.29
32	Kota Salatiga	4972.758
33	Kota Semarang	-33890.61
34	Kota Pekalongan	6763.891
35	Kota Tegal	724.4913